

Volume 12, Nomor 1, September 2014

ISSN : 1693 - 5772

AREOPAGUS

JURNAL PENDIDIKAN DAN TEOLOGI KRISTEN



Unit Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI
TARUTUNG
TAPANULI UTARA - SUMATERA UTARA
INDONESIA

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MENUJU PENDIDIKAN YANG HUMANIS

Bernadetha Nadeak *)

bena_beni@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kajian tentang konsep teori dan aplikasi pendidikan multikultural menuju pendidikan yang humanis. Artikel ini merupakan kajian pustaka yang menganalisis berbagai teori ahli tentang pendidikan multikultural, sejarah, tujuan dan fungsinya dalam proses pendidikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk.

Hasil kajian ini menjelaskan bahwa Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Pendidikan Multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Melalui pendidikan multikultural dapat dikembangkan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap berbagai etnik, baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif. Pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan terhadap Ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

Temuan penelitian memberi implikasi kepada setiap pekerja pendidikan di Indonesia untuk memahami pendidikan multikultural sebagai salah satu pemikiran yang perlu diimplementasikan dalam praktek pendidikan di sekolah mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Kebudayaan, Pendidikan Humanis

PENDAHULUAN.

Perbedaan ras, etnis, suku, budaya, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat adalah kekayaan milik Tuhan Yang Maha Kuasa pada proses penciptaan manusia. Perbedaan, baik menyolok maupun tidak sering menjadi alasan untuk berbenturan pendapat dan perilaku. Perbedaan-perbedaan yang Tuhan tempatkan pada hati dan pikiran tiap orang sering menjadi alasan untuk tidak saling memahami, tidak saling mengerti, maka tidak saling menerima. Kemampuan memahami dan menerima satu dengan yang lainnya juga merupakan kekayaan Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap orang pada usia, fase atau tahap tertentu perkembangan kejiwaan dan kepribadian manusia. Dimana sebelum fase atau tahap tertentu seseorang tidak mampu memahami perbedaan yang Tuhan tanamkan pada tiap orang. Artinya perbedaan pola pikir yang didasari oleh kemampuan berfikir bersumber dari Kuasa Tuhan untuk menciptakan perbedaan. Artinya, perbedaan adalah sesuatu yang memang harus demikian, supaya perbedaan itupun menjadi dasar

untuk saling menerima karena harus saling melengkapi dalam perjalanan hidup setiap orang.

Menjelaskan kepada masyarakat tentang alasan adanya perbedaan dan bagaimana masyarakat menanggapi, sehingga menjadi alasan untuk saling menerima membutuhkan instrument yang dapat diterima secara universal oleh semua etnis, ras, atau semua golongan yang ada di muka bumi. Instrument dimaksud adalah pendidikan yang bersifat universal, yang mampu mentransformasi pemahaman akan nilai perbedaan menjadi nilai persamaan (nilai sama-sama saling membutuhkan) jika dipandang dari berbagai aspek kehidupan. Pendidikan dimaksud disebut pendidikan multicultural

METODOLOGI

Penelitian menggunakan kajian pustaka (*library research*), dengan focus pembahasan Pendidikan Multikultural sebagai pendidikan yang humanis yang dapat membangun persatuan dan kesatuan

*) Tenaga Pengajar di STAKPN Tarutung

bangsa pada negara-negara yang penduduknya majemuk (*plural*), seperti Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah istilah yang sudah lama muncul dalam dunia pendidikan. Masyarakat yang harus mengapresiasi pendidikan multikulturalisme adalah masyarakat yang secara objektif memiliki anggota heterogen dan plural. Paling tidak heterogenitas dan pluralitas masyarakat itu bisa dilihat dari eksistensi keragaman suku, etnis, agama, dan budaya. Pada hakikatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi pendidikan Nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional dalam teori moderen, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Secara nasional, pendidikan merupakan sarana yang dapat mempersatukan setiap warga menjadi suatu bangsa melalui pendidikan, setiap peserta didik di fasilitasi, dibimbing dan dibina untuk menjadi warga negara yang menyadari dan merealisasikan hak dan kewajibannya. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara ini apabila dimiliki secara kolektif akan mempersatukan mereka menjadi suatu bangsa.

Pendidikan juga merupakan alat yang ampuh untuk menjadikan setiap peserta didik dapat duduk sama rata dan berdiri sama tinggi. Melalui pendidikan dapat dihilangkan rasa perbedaan kelas dan kasta, karena di mata hukum setiap warga negara adalah sama dan harus memperoleh perlakuan yang sama. Pendidikan juga dapat menjadi wahana bagi negara untuk membangun sumber daya manusia yang diperlukan, dalam pembangunan juga bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang

dimiliki. Oleh karena itu, pendidik mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Menurut Tilaar, Profil profesi pendidik abad XXI adalah; 1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, 2) memiliki penguasaan ilmu yang kuat, 3) memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) mengembangkan profesi secara berkesinambungan.

Muhammad Ali menjelaskan, istilah multikultural jika ditela'ah asal-usul sejak tahun 1960-an setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting pot yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika khususnya di New York dan California. Istilah multikultural tersebut selalu mereka kaitkan dengan pendidikan, yang mempunyai arti meliputi *any set of processes by which school work than again appressed group*

Sejalan dengan pernyataan Will Kymlicka yang dikutip Tillaar, bahwa multikultural merupakan suatu pengakuan penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengeksperesikan kebudayaan. Sedikit berbeda dengan Steinhagen, yang memandangnya bahwa konsep multikultural mengandung dua pengertian. Konsep pertama, ia merupakan realitas dalam masyarakat yang heterogen. Pernyataan dari segi ini sebanyak 95 % negara-negara didunia pada dasarnya adalah bersifat multikultural mengingat secara etnis dan budaya bersifat plural. Konsep kedua, multikultural telah diangkat sebagai suatu keyakinan ideologi, sikap, maupun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budaya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, yang harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan.

Hamid Hasan mengemukakan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti dinyatakan dalam motto nasional "Bhinneka Tunggal Ika" (Bhin = berbeda banyak; Tunggal = satu). Oleh karena itu, kebudayaan menjadi landasan kuat bagi bangsa Indonesia. Menurut K.I. Hajar Dewantara, "kebudayaan" itu berarti buah budi manusia, sedangkan, bila mengingat cara terjadinya atau lahirnya kebudayaan, bolehlah kebudayaan dinamakan "kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia". Budi,

tidak lain adalah jiwa yang sudah masuk, sudah cerdas dan oleh karenanya sanggup dan mampu mencipta, karena budi manusia itu mempunyai dua sifat yang istimewa, yaitu sifat luhur dan sifat halus pula, maka segala ciptaannya senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus pula. Sebagai kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia, yaitu dalam perjuangannya terhadap dua kekuatan yang abadi, yakni alam dan zaman, dalam perjuangan manusia tetap dan terus-menerus berhasil mengatasi segala pengaruh alam dan zaman yang mengukirkan hidupnya lahir dan batin. Maka kebudayaan itu selain bersifat luhur dan halus (indah), juga selalu mempunyai sifat mengembangkan hidupnya serta pula membesarkan hasil hidupnya. Ini berarti memberi kemajuan hidup dan penghidupan pada manusia, inilah kejayaan hidup manusia.

Kemajuan hidup dan penghidupan manusia pada umumnya nampak sebagai keinginan, kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan hidup yang serba tertib dan damai, tertib dalam sifatnya lahir dan damai dalam batinnya, dan inilah yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Kebudayaan ini tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus menerus berganti-ganti wujudnya, ini disebabkan karena berganti-gantinya alam dan zaman. Kebudayaan yang dalam zaman yang lampau mengembangkan dan menguntungkan hidup, boleh jadi dalam zaman sekarang menukarkan hidup. Karena budi manusia itu meliputi segala gerak-gerik, maka pikiran dibagi menjadi: buah pikiran (misalnya ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengajaran filsafat), buah perasaan (misalnya adat istiadat, kenegaraan, keadilan, keagamaan, kesosialan, dan sebagainya), buah kemauan (misalnya: semua sifat perbuatan manusia, seperti industri, pertanian, percakapan, bangunan-bangunan lain-lain).

Rendah tingginya kebudayaan ini menunjukkan rendahnya budi serta peradaban dalam hidupnya sesuatu bangsa, kebudayaan tidak lain ialah sifat utuhannya atau globalnya hidup sesuatu bangsa. Kebudayaan selalu mempunyai sifat nasional, karena rakyat yang menimbulkan kebudayaan tersebut ialah semua orang-orang yang hidupnya didalam satu lingkungan alam, dan satu lingkungan zaman. Perkataan alam dan zaman boleh juga kita ganti dengan sebutan kodrat dan masyarakat karena kodrat dan masyarakat karena

kodrat itu kekuatan alam, sedangkan masyarakat itulah yang mewujudkan zaman.

Musa Asy'arie, mengemukakan pendidikan multikultural adalah proses penemuan cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multicultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Jika melihat sejarah Indonesia, maka realitas konflik sosial yang terjadi seringkali mengambil bentuk kekerasan sehingga mengancam persatuan dan eksistensi bangsa. Pengalaman peperangan antara kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan telah membentuk fanatisme kesukuan yang kuat. Sedangkan terjadinya konflik sosial setelah kemerdekaan, sering kali bertendensi politik, dan ujungnya adalah keinginan suatu komunitas untuk melepaskan diri dari kesatuan wilayah negara kesatuan, bahkan buntutnya masih terasa hingga sekarang, baik yang terjadi di Aceh dan Papua. Tanpa pendidikan cultural, maka konflik sosial yang destruktif akan terus menjadi suatu ancaman yang serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa.

Muhaemin, menyatakan sudah merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-negara Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Tetapi pada pihak lain, realitas "multikultural" tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang dapat menjadi "integrating force" yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Perbedaan budaya merupakan seluruh konduksi dalam hubungan interpersonal. sebagai contoh ada orang yang bila diajak bicara (pendengar) dalam mengungkapkan perhatiannya cukup dengan

mengangguk-anggukkan kepala. Namun dalam kelompok lain untuk menyatakan persetujuan cukup dengan mengedipkan kedua matanya. Dalam beberapa budaya, individu-individu yang berstatus tinggi biasanya yang memprakarsai, sementara individu yang statusnya rendah hanya menerima saja sementara dalam budaya lain justru sebaliknya.

Beberapa psikolog menyatakan bahwa budaya menunjukkan tingkat intelegensi masyarakat. Sebagai contoh, gerakan lemah gemulai merupakan ciri utama masyarakat Bali. Oleh karena kemampuannya untuk menguasai hal itu merupakan ciri dari tingkat intelegensinya. Sementara manipulasi atau rekayasa kata dan angka menjadi penting dalam masyarakat Barat. Oleh karenanya "keahlian" yang dimiliki seseorang itu menunjukan kepada kemampuan intelegensinya.

Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. Pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras dan juga Agama merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun Agama. Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, Agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengjar tujuan yang lebih besar, baik bentuk materi maupun non-materi. Konsepsi yang lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan "Kristen" misalnya, diharapkan semua orang Kristen merapatkan barisan untuk mem-back up kepentingan politik. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari preferensi yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi. Ketiga, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya.

Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah.

Dalam konteks pendapat yang ketiga, terdapat ruang wacana tentang multikulturalisme dan pendidikan kultural sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman. Wacana ini mulai ramai terdengar dikalangan akademis, praktis budaya dan aktifis diawal tahun 2000 di Indonesia. Tulisan ini dimaksud sebagai kajian tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai bahan kajian lanjutan untuk mengetahui corak, peluang dan tantangan pendidikan multikultural di Indonesia.

Orientasi Pendidikan Multikultural

Menurut Umi khumaidah, orientasi yang dibangun dan dipertahan pendidikan multikultural adalah:

1. Orientasi kemanusiaan, humanisme yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan bersifat universal, global, di atas semua suku, aliran, ras golongan, dan agama, jauh dari sifat eksploitatif, dominatif, kompetitif yang sebebas-bebasnya.
2. Orientasi kebersamaan, yaitu nilai kooperatif yang sangat mulia dalam masyarakat plural dan heterogen. Kebersamaan ini bebas dari nilai kolusif, tidak ada kebersamaan yang hakiki ketika masing-masing pihak memiliki Hidden Agenda sendiri-sendiri. Karena yang terjadi adalah kecurigaan dari masing-masing pihak.
3. Orientasi kesejahteraan, welvarisme yang merupakan sebuah kondisi yang dihadapkan masyarakat terwujud dengan adanya kesadaran diri tanpa ada paksaan untuk keadaan itu.
4. Orientasi profesional, yaitu aspek ketepatan, tepat landasan, tepat proses, tepat kuantitatif, dan tepat tujuan.
5. Orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas.
6. Orientasi anti hegemoni dan anti dominasi, kedua istilah ini sangat populer bagi kaum tertindas

Muhaemin, mengemukakan konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah melaksanakan khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan

memajukan dan memelihara integritas nasional. Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagai contoh berikut: Di Amerika, sebagai contohnya muncul serangkaian konsep tentang pluralitas yang berbeda-beda, mulai dari melting pot sampai multikulturalisme. Sejak columbus menemukan benua Amerika, berbagai macam bangsa telah menempati benua itu. Penduduk yang sudah berada disana sebelum bangsa-bangsa Eropa membentuk koloni-koloni mereka di Amerika Utara terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda-beda bahasa dan budayanya. Tetapi di mata bangsa Anglo-Sakson yang menyebarkan koloni di abad ke- 17, tanah di Negara baru itu ada di kawasan tak bertuan dan bangsa-bangsa yang di temui di benua baru itu tak lebih dari makhluk primitif yang merupakan bagian dari alam yang mesti di taklukkan. Dari perspektif kaum puritan yang menjadi acuan utama sebagian besar pendatang dari Inggris tersebut, berbagai suku bangsa yang dilabel secara generik dengan nama "Indian" adalah bangsa kafir pemuja dewa yang membahayakan kehidupan komunitas berbasis agama tersebut. Di sini terlihat bagaimana pandangan berperspektif tunggal yang datang dari budaya tertentu membutuhkan mata terhadap kenyataan keragaman yang ada.

Amerika Serikat ketika ingin membentuk masyarakat baru-pasca kemerdekaannya (4 Juli 1976) baru disadari bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan. Melalui pendekatan inilah, dari SD sampai Perguruan Tinggi, Amerika Serikat berhasil membentuk bangsanya yang dalam perkembangannya melampaui masyarakat induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang pelopori oleh John Dewey. intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 950-an di Kanada.

Menurut Longer Oxford Dictionary istilah "muticulturalis" merupakan deviasi dari kata "multicultural". Kamus ini menyitir kalimat surat kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat "multicultural dan multi-lingual". Sedangkan wacana tentang pendidikan multikultural, secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai "pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan". Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan merupakan "menara gading" yang berusaha menjauhi realits sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa, (Hilliard, 1991/1992). Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan agama. Selanjutnya James Banks, yang dikutip Muhaemin, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan;

1. *Content integration*
Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. *The knowledge Construction Process*
Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
3. *An Equity Paedagogy*
Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.

4. *Projudice Reduction*

Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.

Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Dalam aktivitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (obyek) dan sekaligus sebagai subyek pendidikan. Oleh sebab itu dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik memiliki empat ciri yaitu;

1. Peserta didik dalam keadaan sedang berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
2. Mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa.
3. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda.
4. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu.

Menurut Tilaar, program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan intelektual yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti (*difference*), atau "*politics of recognition*" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "*indifference*" dan *Non-recognition*" tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang "*ethnic studies*" untuk kemudian

menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.

Istilah "pendidikan multikultural" dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestinya mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek lain yang relevan.

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat, pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Pendidikan Multikultural Menuju Pendidikan Humanis

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasikan yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

Menurut Azyumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada orde baru memaksakan "*monokulturalisme*" yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang

bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintah, terjadi peningkatan gejala "provinsialisme" yang hampir tumpang tindih dengan "etnisitas". Kecendrungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.² Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang di pakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada, terbatas pada keragaman budaya yang ada, jadi terbatas pada dimensi kognitif.

Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Penulisan kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam merupakan suatu agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis dan pratisi pendidikan. Di Jepang aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jepang pada peran dunia II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagian masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang, agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali. Sedangkan di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latar belakang dalam pembentukan Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi "dendam sejarah" di berbagai wilayah.

Model lainnya adalah pendidikan multikultural tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. *Affirmative action* dalam seleksi siswa sampai rekrutmen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktur terhadap kelompok

minoritas. Contoh yang lain adalah model "sekolah pembauran" Iskandar muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok. Di Amerika Serikat bersamaan dengan masuknya wacana multikulturalisme, dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah maupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi dan mengurangi prasangka antar kelompok. Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yaitu: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat.

Menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas "merayakan keragaman" belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasial. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut. Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Adapun beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu :

Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal diluar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan-kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata

dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengosiosasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama yang lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecendrungan memandang anak didik secara stereotif menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan, kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. *Kelima*, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikhotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Dalam konteks keindonesiaan dan kebhinekaan, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau

individu-individu yang terjewantah dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zakiah Darajat yang menyatakan, bahwa masyarakat secara sederhana diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama.

Jadi dapat dipahami inti masyarakat adalah kumpulan besar individu yang hidup dan bekerja sama dalam masa relatif lama, sehingga individu-individu dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menyerap watak sosial. Kondisi itu selanjutnya membuat sebagian mereka menjadi komunitas terorganisir yang berpikir tentang dirinya dan membedakan ekstensinya dari ekstensi komunitas. Dari sisi lain, apabila kehidupan di dalam masyarakat berarti interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya, maka yang menjadikan pembentukan individu tersebut adalah pendidikan atau dengan istilah lain masyarakat pendidik. Oleh karena itu, dalam melakukan kajian dasar kependidikan terhadap masyarakat. Secara garis besar dasar-dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang.
2. Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan.
3. Individu-individu, di dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut tantangan sosial.
4. Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
5. Pertumbuhan individu di dalam komunitas, keterikatan dengannya, dan perkembangannya di dalam bingkai yang menuntunnya bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam dunia pendidikan, masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. Untuk itu, setiap

anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dalam upaya memperdayakan masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan satu hal penting untuk kemajuan pendidikan. Maka dari itu, Umi Khumaidah menjelaskan ada beberapa signifikansi pendidikan multikultural yaitu:

- b. Pendidikan multikultural memandang bahwa manusia memiliki beberapa dimensi yang harus diakomodir dan dikembangkan secara keseluruhan. Orientasi pendidikan multikultural adalah untuk memanusiakan manusia.
- c. Pendidikan multikultural tidak mentolirir adanya ketimpangan kurikulum. Pendidikan multikultural mengakui dan menghargai adanya perbedaan filosofi keilmuan, sesuai dengan keilmuan manusia yang beragam tersebut, seseorang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan bakat serta minat yang dimilikinya. Maka dari itu, sangatlah tidak relevan ketika pendidikan multikultural hanya mengembangkan kualitas kognisi intelektual belaka.
- d. Pendidikan multikultural berupaya menjadi jembatan emas bagi keterpisahan lembaga pendidikan dari kemanusiaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan multikultural senantiasa mengakomodir semua keinginan dan kebutuhan semua masyarakat. Artinya pendidikan multikultural tidak boleh membedakan kebutuhan yang bersifat intelektual, spiritual, material, emosional, etika, estetika, sosial, ekonomikal, dan transedental dari seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai ragam stratanya.
- e. Pendidikan multikultural menghendaki biaya pendidikan menjadi sangat ringan dan dapat digapai oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Kebudayaan adalah buah budi manusia, melalui pendidikan multikultural dapat dikembangkan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif. Pendidikan multikultural adalah suatu

pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam pendidikan sebenarnya tidak membedakan etnik, ras dan lain sebagainya. Pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1994
- Azra Azyumardi, Paradigma baru , Pendidikan Nasional, Jakarta: Kompas, 2006
- Hamid Hasan, Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan kurikulum Nasional. Internet, 2008
- Faisal Jalal, Reformasi Pendidikan, Jakarta Depdiknas- Bappenas. Adicitrakarya Nusa. 2001
- H.A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam perspektif abad 21 Malang : Indonesia Tera, 1999
- _____, Kekuasaan dan Pendidikan, Megelang : Indonesia Tera, 200
- K.I. Hajar Dewantara, Kebudayaan, Jogjakarta : Taman Siswa, 1976
- Muhammad Ali, dkk, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bandung : Pedagogiana Press, 2007
- Muhaemin, Artikel multikulturalisme dan Pendidikan multikultural. Internet, 2008
- Musa Asy'arie, Atikel Pendidikan Multikultural dan konflik Bangsa. Internet, 2008
- Sisdiknas, Undang-undang Republik Indonesia, Bandung : Citra Umbara, 2006
- A.Qodri A, Azizy, Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial, Semarang: Aneka Ilmu, 2003
- Hariyanto, Muchlas Samani, Pendidikan Karakter, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Umi Khumaidah, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.